

Implementasi Program Pertanian Perkotaan Pada Kelompok Tani Subur Makmur di Kota Surabaya

Vivi Eriyanti ^{1*}; Arimurti Kriswibowo ²

^{1,2} Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur, Surabaya, Indonesia; eriyantivivi2@gmail.com ;
arimurti.adne@upn.ac.id

*Correspondence : arimurti.adne@upn.ac.id

ABSTRAK

Program pertanian perkotaan merupakan sebuah implementasi kebijakan Pemerintah Kota Surabaya yang menerapkan program yang berhubungan dengan sektor pertanian di perkotaan yang mengikutsertakan keahlian, inovasi dan tata kelola pangan untuk penduduk kota dengan menggunakan tanah kosong disekitar untuk mengoptimalkan ekonomi, kesehatan serta taraf hidup keluarga dan memberi motivasi supaya semakin produktif untuk menggunakan tanah di sekitar mereka. Penelitian pertanian perkotaan pada kelompok tani subur Makmur bertujuan untuk menggambarkan proses implementasi yang dilaksanakan oleh DKPP Kota Surabaya bersama dengan masyarakat kelompok tani Subur Makmur dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakatnya. Metode penelitian yang digunakan yaitu deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu David C. Korten yang meliputi tiga elemen, yakni program, organisasi pelaksana dan kelompok sasaran. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hasil dari Implementasi Program Pertanian Perkotaan pada Kelompok Tani Subur Makmur di Kelurahan Pagesangan Kecamatan Jambangan Kota Surabaya yang dijalankan oleh kelompok sasaran program menunjukkan hasil yang baik sebagai upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat..

ABSTRACT

The urban agriculture program is an implementation of the Surabaya City Government policy which implements programs related to the agricultural sector in urban areas that include expertise, innovation and food management for urban residents by using the surrounding vacant land to optimize the economy, health and standard of living of families and provide motivation to more productive to use the land around them. Urban agricultural research in Subur Makmur fertail farmers to describe the implementation process carried out by DKPP of Surabaya and The Subur Makmur to improve the quality of life. The research method used is descriptive qualitative with data collection techniques in the form of observation, interviews and documentation. The theory used in this study is David C. Korten which includes three elements, namely the program, the implementing organization and the target group. The results showed that the results of the Implementation of the Urban Agriculture Program for Subur Makmur Farmer Groups in Pagesangan Village, Jambangan District, Surabaya City, which were carried out by the program's target group, showed good results as an effort to increase community welfare and community empowerment.

Kata kunci

Implementasi, Kelompok Tani, Pertanian Perkotaan

Keywords

Implementation, Farmer Groups, Urban Agriculture

Pendahuluan

Sesuai dengan tujuan negara Indonesia yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi “.. melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial..”. Berdasarkan perihal tersebut maka pembangunan di Indonesia bisa ditentukan dari kesejahteraan masyarakatnya. Kesejahteraan yang dimaksud dalam hal ini tidak hanya dibidang ekonomi untuk mencukupi kebutuhan sandang, pangan, dan papan saja namun mencukupi kebutuhan-kebutuhan ekonomi, sosial, jasmani, dan rohani (Setyaningrum 2021). Pemberdayaan masyarakat pada aspek pertanian adalah isu yang dikembangkan dalam usaha memperkuat perekonomian masyarakatnya. Dalam laporan *McKinsey Global Institute* Pada Tahun 2022 sebagai sebuah lembaga konsultan manajemen yang memiliki fokus terhadap isu manajemen pemerintahan, pada 2012 mengemukakan bahwa supaya menjadi sebuah bangsa yang memiliki ekonomi yang besar dan kuat, paling tidak wajib mencakup empat persyaratan yakni pemerintah yang berfokus untuk mengatur penggunaan dalam negeri, meningkatkan pertanian dan perikanan, mengatur Sumber Daya Alam (SDA) serta Sumber Daya Manusia (SDM).

Optimalisasi kesejahteraan masyarakat senantiasa dihubungkan dengan usaha masyarakat dalam mengatasi persoalan kemiskinan dalam upaya peningkatan kualitas hidup masyarakat. Persoalan tersebut umumnya dipersepsikan dengan keadaan kehidupan masyarakat di wilayah desa. Namun nyatanya, pada daerah kota dengan tingkat urbanisasi yang tinggi sudah menyebabkan adanya kelompok masyarakat miskin di wilayah kota. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Tahun 2022 (Statistik, 2022), Kota Surabaya adalah pusat kota perdagangan, arus bisnis serta pastinya sebagai pusat pemerintahan Provinsi Jawa Timur selaku kota besar tidak bisa dilepaskan dari permasalahan peningkatan kualitas hidup masyarakat yang dapat dilihat dari segi tercapainya ketahanan dan kebutuhan pangan suatu kota. Kota Surabaya dijadikan tujuan urbanisasi oleh berbagai warga sekitar wilayah Kota Surabaya sebagai tempat adu nasib ketika gencarnya isu permasalahan urban. Hal ini memunculkan persoalan baru di tengah kota besar tersebut dikarenakan terdapat peningkatan penduduk yang diakibatkan oleh arus urbanisasi cukup tinggi serta visi untuk mengembangkan kota hanya berfokus pada kenaikan ekonomi daerah

Peran pada sektor industri pertanian pada susunan ekonomi kota Surabaya juga cenderung kecil dan terjadi penurunan per tahun. Dihitung sejak 2016 meraih 0,17 %, 2017 meraih 0,16 %, 2018 meraih 0,15 %, 2019 meraih 0,14 %, dan pada tahun 2020 mencapai 0,14 % Sumber dari BPS Kota Surabaya (Statistik, 2022). Faktor industrial tersebut mengakibatkan area pertanian mengecil sebab adanya perubahan fungsi

lahan pertanian ke lahan industri, permukiman, dan gedung penunjang aktivitas publik lainnya.

Data Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Surabaya menyebutkan bahwa lahan pertanian sawah di Kota Surabaya hanya 1179,60 Ha atau 11,79 Km². Sedangkan untuk lahan pertanian bukan sawah hanya 5055 Ha atau 50,55 Km², sehingga minimnya lahan tersebut membuat sektor pertanian Kota Surabaya tidak mengalami kemajuan yang signifikan. Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2021 dari total Rp. 9.838.392.793.866 APBD yang diterima Kota Surabaya, hanya Rp.553.584.00 atau sekitar 0,7% yang dianggarkan kepada sektor pertanian. Sektor pertanian mendapatkan anggaran yang termasuk kecil dibandingkan sektor pada bidang lain seperti industri, perdagangan, konstruksi dan lain-lain. Masalahnya, dengan keterbatasan lahan produktif pertanian dan alokasi dana yang diberikan seringkali kebijakan atau program yang dibuat masih belum dapat menggambarkan secara tepat terkait tujuan yang diharapkan. Mulai dari petani yang menjadi objek kebijakan atau program yang dilaksanakan, penganggaran, penyaluran, serta pengawasan yang masih rentan terhadap permasalahan yang ada di lapangan.

Berdasarkan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 56 Tahun 2016 terkait Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Surabaya pada bagian kelima bidang pertanian Pasal 12 Ayat 2 mengenai seksi pengembangan pertanian perkotaan menyebutkan bahwa Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Surabaya mengatur tentang rencana anggaran seksi pengembangan pertanian perkotaan, penyusunan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan program hingga melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan pengembangan pertanian perkotaan. Dengan kata lain pertanian perkotaan di Kota Surabaya menjadi tanggung jawab Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Surabaya dalam melaksanakan aktivitas pertanian perkotaan dengan melibatkan pengalaman, kompetensi yang terampil serta pola pikir secara berkelanjutan untuk meningkatkan kebutuhan bahan pangan untuk masyarakat kurang mampu yang bermanfaat untuk meningkatkan kondisi gizi, meningkatkan perekonomian, serta kualitas hidup dan kemakmuran penduduk yang selanjutnya menciptakan sebuah motivasi agar dapat hidup semestinya serta ekonomi yang mandiri.

Program pertanian perkotaan merupakan sebuah implementasi kebijakan Pemerintah Kota Surabaya yang menerapkan program yang berhubungan dengan sektor pertanian di perkotaan yang mengikutsertakan keahlian, inovasi dan tata kelola pangan untuk penduduk kota dengan menggunakan tanah kosong disekitar untuk mengoptimalkan ekonomi, kesehatan serta taraf hidup keluarga dan memberi motivasi supaya semakin produktif untuk menggunakan tanah di sekitar mereka sekarang, luas lahan pertanian semakin berkurang akibat pembangunan di sektor industry. Selain itu kebijakan program pertanian perkotaan yang dilaksanakan

Pemerintah Kota Surabaya juga sesuai dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 yang menyatakan bahwa negara memiliki kewajiban menciptakan ketersediaan, keterjangkauan, serta memnuhi konsumsi pangan yang cukup, aman, bermutu, serta gizi yang seimbang, di tingkat nasional atau daerah agar semua orang secara menyeluruh di seluruh wilayah Indonesia sepanjang masa dengan menggunakan sumber daya, kelembagaan, serta budaya lokal.

Melalui program pertanian kota tersebut, dibentuklah kelompok-kelompok tani sebagai sarana untuk menjalankan program tersebut. Dikutip dalam jurnal Athariyanto (2013) Pemkot Surabaya sejak 2007 sudah merencanakan program pertanian perkotaan yang dikhususkan untuk keluarga miskin di Surabaya. Program pertanian perkotaan yang dilaksanakan oleh Pemkot Surabaya bermaksud guna menurunkan kemiskinan, melaksanakan pemberdayaan serta selaku sarana pengajaran dan meningkatkan sumber daya manusia pada sektor pertanian yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat.

Pada Kelurahan Pagesangan Kecamatan Jambangan terdapat suatu kelompok tani yakni kelompok tani Subur Makmur yang mempunyai sebuah potensi sumber daya lokal yakni sebuah program rumah hidroponik yang menjadi salah satu aktivitas implemtnasi pertanian kota sebagai upaya peningkatan kualitas hidup masyarakat yang dapat dilihat dan dinilai dari tercapainya kebutuhan pangan masyarakatnya. Kehadiran program rumah hidroponik yang di usung oleh kelompok tani Subur Makmur menjadi *urgent* aktifitas pertanian kota karena seiring dengan meningkatnya jumlah masyarakat miskin pada wilayah kota dan makin tingginya penekanan terhadap sumber penghasil pangan, program pertanian kota menjadi salah satu solusi yang tepat yang dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat perkotaan, produktifitas dan kebutuhan akan pangan khususnya pangan lokal, perbaikan lingkungan, peningkatan kesejahteraan, stabilitas ekonomi serta peningkatan pembangunan disektor pertanian demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Pertanian kota dengan program rumah hidroponik yang diusung oleh kelompok tani Subur Makmur dilaksanakan untuk mengoptimalkan akses, kuantitas, serta kualitas pangan bagi kaum tani kota.

Penelitian pertanian perkotaan yang dilaksanakan pada kelompok tani Subur Makmur Kota Surabaya penting dilakukan karena setiap daerah memiliki kebijakan masing-masing terkait ketahanan pangan dan pertanian, memang wilayah perkotaan tidak harus memiliki dukungan penuh melalui sektor pertanian. Namun setidaknya dengan adanya kelompok tani dapat menunjang ketahanan pangan dan peningkatan sektor ekonomi ditingkat lokal meskipun kontribusinya tidak secara penuh. Dalam buku *Center for Indonesian Policy Studies (CIPS)* pada tahun 2020 menyebutkan bahwa dalam upaya membentuk perlindungan dan pengembangan pada petani, pemerintah berwenang wajib menyediakan subsidi secara penuh bagi petani. Selain itu, sesuai dengan yang tercantum dalam Permentan Nomor 67 Tahun 2016 dimana kebijakan

pertanian perkotaan yang dilaksanakan hendaknya dapat mencapai dan membentuk sinergitas antara petani dan pemerintah.

Pada penelitian sebelumnya yang diteliti oleh Setyaningrum (2021), penerapan program pertanian perkotaan untuk mengoptimalkan taraf hidup masyarakat kota yang dilaksanakan kurang efisien dan efektif dalam penerapannya, sehingga belum memiliki dampak yang signifikan dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat serta membentuk sinergi antara pemerintah dan petani. Temuan penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa pelaksanaan program pertanian belum sepenuhnya mampu memberdayakan masyarakat secara keseluruhan dan pengelolaan masih belum dilaksanakan secara profesional. David C. Korten dalam Bahri (2020) menyebutkan bahwa dalam implementasi program terdapat tiga elemen utama dalam menentukan keberhasilan suatu program yaitu elemen program, elemen organisasi pelaksana serta elemen kelompok sasaran. Penelitian ini menggunakan model dari David C. Korten karena ingin mengetahui dan mengukur suatu keberhasilan kebijakan dengan menggunakan tiga variabel kesesuaian program pertanian perkotaan pada kelompok tani Subur Makmur. Model kesesuaian implementasi program David C Korten ini menekankan pada keberhasilan program, bahwa program akan mencapai tujuan jika terdapat keterkaitan tiga unsur yakni kesesuaian program dengan kelompok sasaran, kesesuaian program dengan organisasi pelaksana, serta kesesuaian antara kelompok sasaran dengan organisasi pelaksana. Hal ini disebabkan apabila output program tidak sesuai dengan kebutuhan kelompok sasaran, jelas output tidak dapat dimanfaatkan. Jika organisasi pelaksana tidak dapat melaksanakan tugas yang disyaratkan oleh program maka output program tidak akan tepat, serta syarat yang diberikan organisasi pelaksana tidak dapat dilaksanakan oleh kelompok sasaran, maka output yang diharapkan juga tidak akan tercapai.

Metode

Pada penelitian ini penulis menggunakan metode kualitatif. Barlian (2009) metode kualitatif merupakan metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, dimanfaatkan untuk mengkaji pada keadaan objek secara alami yang mana peneliti merupakan instrumen utama, cara memperoleh informasi dilaksanakan melalui triangulasi, analisa data bersifat kualitatif, serta perolehan riset kualitatif lebih terfokus pada implementasi program pertanian perkotaan pada kelompok tani Subur Makmur di Kelurahan Pagesangan Kecamatan Jambangan Kota Surabaya.

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi. jenis observasi yang digunakan oleh peneliti ialah observasi terstruktur atau tersamar agar mendapatkan data yang lebih lengkap, relevan dan jelas. Kemudian wawancara terstruktur dikarenakan penulis sudah menyiapkan pedoman wawancara sebelum melakukan wawancara secara langsung agar mendapatkan data yang relevan sekaligus lebih jelas dan detail. Pada

penelitian ini informan kunci ada 2 aktor yang dianggap peneliti mampu menjawab fokus yang digunakan dalam penelitian yaitu: 1) Pihak Kelompok Tani Subur Makmur Kelurahan Pagesangan (kelompok sasaran sebagai penerima program yang ditawarkan) 2) Pihak Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Surabaya, Kepala Seksi Bidang Pengembangan Pertanian Perkotaan. Model dokumentasi pada penelitian ini dengan mengumpulkan dan menganalisis dokumen yang mendukung riset untuk mendapatkan data serta informasi lebih banyak. Dokumentasi ini dimaksudkan supaya mendapatkan data secara langsung dari lokasi riset. Dokumentasi dapat dalam bentuk tulisan, gambar atau karya monumental seseorang. Pada riset ini data dokumen yang akan dijadikan pelengkap di antara data laporan, berita, dan arsip kegiatan.

Adapun sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan sekunder. Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data primer adalah data yang diperoleh saat berada di lapangan dari informan utama. Sedangkan data sekunder, diperoleh dari dokumentasi dan arsip-arsip lainnya dengan bantuan media cetak maupun media internet yang berkaitan dengan implementasi program pertanian perkotaan pada kelompok tani Subur Makmur di Kelurahan Pagesangan Kecamatan Jambangan Kota Surabaya.

Untuk menguji keabsahan data yang diperoleh dalam penelitian ini, peneliti menggunakan triangulasi sumber yaitu proses teknis validasi data yang dilakukan dengan meninjau data penelitian dari berbagai sumber (Hardani,2020) melalui wawancara mendalam pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Surabaya Sub Bidang Pengembangan Pertanian Perkotaan dan Ketua Kelompok Tani Subur Makmur. Adapun teknik analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan model Interaktif Miles dan Huberman dalam (Sugiyono, 2019; Ramdani et al., 2021; Sudirman & Phradiansah, 2019))

Hasil dan Pembahasan

1. Program

a. Tujuan yang ingin dicapai secara jelas dan kebijakan-kebijakan yang diambil dalam mencapai tujuan

Pelaksanaan program pertanian perkotaan yang dilakukan oleh kelompok tani Subur Makmur selaku pelaksana atau kelompok sasaran tidak sembarangan dalam proses penetapan programnya. Dengan adanya tujuan dan kebijakan yang diambil dalam pelaksanaan program pertanian perkotaan khususnya rumah hidroponik yang dilaksanakan pada kelompok tani Subur Makmur merupakan bagian dari proses partisipasi yang memberikan kepercayaan dan kesempatan kepada kelompok tani untuk turut serta melihat dan menganalisis tantangan utama dalam pembangunan masyarakat. Selain itu, untuk sejauh mana kebermanfaatannya yang dirasakan oleh kelompok sasaran yang kemudian merujuk pada indikator-indikator

implementasi program. Selaras dengan hasil wawancara yang disampaikan oleh Ibu Dian selaku Ketua Bidang Pengembangan Pertanian Perkotaan

“Kalau Surabaya kan beda dengan daerah-daerah lain karena Kota Surabaya merupakan kota besar dan minim lahan pertanian, maka dari itu untuk meningkatkan aktivitas giat bertani dilakukanlah kegiatan pertanian perkotaan untuk memberdayakan masyarakat demi tujuan meningkatkan kesejahteraan warga, khususnya warga lokal”. (Wawancara, 13 Februari 2023)

Program pertanian perkotaan yang dilaksanakan pada Kota Surabaya berfungsi untuk memacu peningkatan taraf hidup masyarakat miskin yang bergerak dalam penguatan sektor pertanian perkotaan (Kriswibowo, Khothimah, and Ardhana 2020). Dalam proses pelaksanaan implementasi program pertanian perkotaan khususnya rumah hidroponik, pada awalnya Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Surabaya sebagai penanggung jawab dalam pelaksanaan aktivitas ini melakukan sebuah riset yang nantinya menyesuaikan potensi sumber daya manusia yang ada di lingkungan kelompok tani Subur Makmur sebagai penerima kebijakan. DKPP Kota Surabaya pada awalnya melakukan diskusi dengan seluruh anggota kelompok tani Subur Makmur terkait penancangan program rumah hidroponik yang sekaligus menjadi salah satu *pilot project* rumah hidroponik pada Kota Surabaya. Setelah dilakukannya diskusi kemudian disetujui oleh seluruh anggota kelompok tani Subur Makmur, akhirnya dilaksanakannya program pertanian perkotaan dengan teknik hidroponik pada kelompok tani tersebut. DKPP Kota Surabaya tidak serta merta hanya menunjuk kelompok tani Subur Makmur untuk melaksanakan program rumah hidroponik begitu saja, namun sebelum kegiatan tersebut berjalan, kelompok tani Subur Makmur diberikan sosialisasi dan pelatihan terkait apa dan bagaimana pertanian menggunakan teknik hidroponik itu.

Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Surabaya menegaskan bahwa tujuan dari diadakannya kegiatan pertanian perkotaan pada kelompok tani Subur Makmur sendiri ialah berpeluang untuk dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Terlebih lagi dengan kondisi Kota Surabaya yang merupakan kota besar dan minim lahan pertanian, maka dari itu untuk meningkatkan aktivitas giat bertani dilakukanlah kegiatan pertanian perkotaan untuk memberdayakan masyarakat demi tujuan meningkatkan kesejahteraan warga, khususnya warga lokal dan hal itu sesuai dengan yang tercantum pada Peraturan Walikota Surabaya Nomor 56 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Surabaya yang didalamnya termuat pelaksanaan pertanian perkotaan di Kota Surabaya.

b. Perkiraan anggaran yang dibutuhkan

Dalam indikator ini menjelaskan apakah dalam membentuk perlindungan dan pengembangan pada petani, terdapat anggaran khusus yang diberikan dari pihak yang bertanggung jawab dalam hal ini Dinas Ketahanan pangan dan Pertanian Kota Surabaya kepada kelompok tani Subur Makmur sebagai kelompok sasaran penerima kebijakan. Dalam proses pelaksanaan implementasi program pertanian perkotaan, kelompok tani Subur Makmur memiliki semangat dan antusiasme yang tinggi untuk

mentransformasikan segenap potensi masyarakat dalam melakukan kegiatan rumah hidroponiknya. Karena dalam pelaksanaannya dan pengaplikasiannya, kegiatan rumah hidroponik ini mendapatkan bantuan berupa sarana dan prasarana dari DKPP Kota Surabaya, bantuan tersebut berupa rak hidroponik dan tenda yang masing-masing berjumlah 20 buah, sealer untuk packing, serta benih untuk bibit hidroponik. Hasil wawancara dengan ketua kelompok tani Subur Makmur menjelaskan bahwa

"Kami mendapat bantuan seperti tenda dan rak hidroponik yang masing-masing berjumlah 20 buah, serta kita juga mendapat sealer untuk packing. Bantuan tersebut langsung didistribusikan oleh pihak DKPP sesaat setelah mencanangkan program tersebut ke kelompok tani kami. Kami juga mendapat bantuan benih untuk bibit hidroponiknya namun memang kadang kami masih beli benih juga untuk menunjang kegiatan kelompok tani kami, karena kadang proses distribusi benih dari dinas itu tidak menentu, jadi ya kami cari solusi dengan beli benih mandiri untuk menunjang proses kegiatan kelompok tani kami". (Wawancara pada 14 Februari 2023).

Dalam hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 67 Tahun 2016 dimana dalam upaya membentuk perlindungan dan pengembangan pada petani, pemerintah berwenang wajib menyediakan subsidi secara penuh bagi petani. Hal tersebut juga sesuai dengan apa yang tertulis pada buku *Center for Indonesian Policy Studies* pada tahun 2020 yang menyatakan bahwa para pelaku pertanian mendapatkan subsidi secara penuh dalam pelaksanaan segala aktivitas pertanian. Namun pada temuan di lapangan masih didapati kelompok tani membeli bibit menggunakan uang kas pribadi. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pada indikator adanya perkiraan anggaran yang dibutuhkan, kelompok tani Subur Makmur sudah cukup terlaksana dengan baik dibuktikan dengan adanya bantuan dari Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Surabaya dalam proses pelaksanaan program rumah hidroponik, meskipun dalam pelaksanaannya masih ditemui para pelaku pertanian terkadang membeli bibit menggunakan uang kas pribadi mereka.

c. Strategi Pelaksanaan

Program pertanian perkotaan yakni rumah hidroponik yang dilaksanakan pada kelompok tani Subur Makmur diharapkan menjadi program percontohan (*pilot project*) pada Kota Surabaya. Secara keseluruhan sebelum melaksanakan program tersebut, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Surabaya selaku pelaksana melakukan berbagai strategi demi tercapainya tujuan dari diadakannya program pertanian perkotaan tersebut melakukan sosialisasi dan pelatihan terhadap anggota kelompok tani Subur Makmur dengan mengoptimalkan sumber daya manusia di dalamnya.

Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Surabaya melakukan kegiatan sosialisasi dan pelatihan selama satu minggu kepada kelompok sebagai salah satu strategi DKPP Kota Surabaya dalam tercapainya tujuan dari diadakannya program rumah hidroponik tersebut. Dalam sosialisasi dan pelatihan tersebut, diharapkan kelompok tani Subur Makmur dapat memberikan pengetahuan terkait teknik

hidroponik dan meningkatkan keterampilan masyarakat khususnya kelompok tani itu sendiri. Dalam kegiatan sosialisasi dan pelatihan tersebut, kelompok tani diberikan pengetahuan terkait apa dan bagaimana cara dalam penerapan pertanian menggunakan teknik hidroponik, mulai dari pembibitan, perawatan, panen hingga pasca panen yang didampingi oleh Petugas Penyuluh Pertanian yang ditunjuk langsung oleh DKPP Kota Surabaya. Hal ini diharapkan untuk bisa memberdayakan dan menggali potensi dari anggota kelompok tani Subur Makmur yang nantinya akan berdampak pada meningkatnya kesejahteraan hidup masyarakat. Selain itu, pertanian perkotaan yang dilaksanakan diharapkan dapat menjadi salah satu proses utama pengentasan kemiskinan selama periode pemulihan ekonomi (Santoso et al. 2018). Sesuai dengan pernyataan yang disampaikan oleh Sub Bidang Pengembangan Pertanian Perkotaan dari Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Surabaya

“Sebelum kegiatan berjalan dan sebelum bantuan didistribusikan, kami memberikan pelatihan kepada kelompok tani. Respon dari kelompok tani juga sangat baik dan sangat antusias dengan program rumah hidroponik ini”. (Wawancara, 13 Februari 2023)

2. Organisasi Pelaksana

a. Kognisi (Pemahaman dan Pengetahuan)

Dalam hal ini yang disebut sebagai organisasi pelaksana ialah Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Surabaya sebagai fasilitator yang bertugas menyampaikan program kepada kelompok sasaran. Struktur birokrasi yang ditetapkan oleh DKPP Kota Surabaya yakni Sub Bidang Pengembangan Pertanian Perkotaan sebagai seorang fasilitator atau biasa disebut dengan Petugas Penyuluh Lapangan (PPL). Penetapan PPL program dilakukan dengan memberikan *Training of Trainer* (TOT) yang sudah terverifikasi. Hal ini dilakukan agar fasilitator memenuhi unsur kelayakan dalam memahami program dengan baik ketika memberikan pelatihan kepada peserta (kelompok sasaran).

Di sisi lain, penetapan seorang fasilitator juga melihat pada sejauh mana keterlibatan pendampingan yang dilakukan fasilitator dalam pendampingan kepada kelompok tani serta kedekatan fasilitator dengan para anggota yang nantinya akan mempermudah proses penyampaian program (Sarah, 2022). Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa indikator kognisi (pemahaman dan pengetahuan) sudah terlaksana dengan baik karena terdapat aktor dalam membantu proses implementasi program pertanian perkotaan yang dilaksanakan pada kelompok tani Subur Makmur.

b. Arah Respon Pelaksana Terhadap Implementasi

Dalam indikator ini menjelaskan bagaimana arah respon pelaksana terhadap implementasi menerima atau menolak. Dalam pelaksanaan implementasi program pertanian perkotaan yang dilaksanakan pada kelompok tani Subur Makmur terkait program rumah hidroponik mendapatkan antusiasme yang sangat tinggi oleh para anggota kelompok tani. Secara keseluruhan, pihak DKPP Kota Surabaya sebelumnya telah melakukan sosialisasi dan pelatihan kepada anggota kelompok tani dengan menggunakan metode diskusi dan praktik langsung. Implementasi kebijakan pada

prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya di mana terdapat dua langkah yang dapat dipilih untuk dapat melaksanakan sebuah kebijakan, yaitu yang pertama langkah langsung melalui program, dan yang kedua melalui formulasi kebijakan derivat atau turunan (Illiyina dan Kriswibowo 2022). Dalam hal ini diharapkan bahwa proses pemberian ilmu dengan teknik hidroponik dapat dipahami dengan mudah.

Kemudian, secara keseluruhan, mayoritas respon peserta (kelompok sasaran) menyatakan bahwa proses transfer ilmu yang disampaikan oleh fasilitator dapat dipahami dengan jelas oleh kelompok sasaran. Hal ini bertujuan agar dalam pelaksanaan kegiatan rumah hidroponik di kemudian hari, para anggota kelompok tani sudah bisa melaksanakan program secara mandiri. Dengan demikian, pada indikator ini, sudah bisa dikatakan berhasil karena kelompok tani Subur Makmur sudah bisa melaksanakan aktivitas rumah hidroponik secara mandiri dan pelaksanaan program rumah hidroponik lebih berkembang dari tahun ke tahunnya. Sesuai dengan pernyataan yang dilontarkan oleh Ibu Atik selaku wakil poktan

“saya setuju dengan kegiatan pertanian perkotaan yang dilaksanakan, karena daripada kami para wanita hanya banyak nganggur, dengan adanya program ini dapat lebih produktif dan bisa hitung-hitung bisa menambah penghasilan juga. Dari pihak DKPP juga memberikan sosialisasi dan pelatihan untuk kami, jadi dalam pelaksanaannya kami tidak kebingungan bagaimana dalam melakukan kegiatan ini”. (Wawancara, 14 Februari 2023)

3. Kelompok Sasaran

Pada elemen ketiga, Korten menekankan pada elemen kelompok sasaran program yang artinya harus terdapat kesesuaian antara sasaran program dengan capaian yang sudah ditentukan oleh organisasi pelaksana sehingga tujuan program dapat bermanfaat untuk sasaran program. Jika tujuan yang ditetapkan organisasi pelaksana tidak dapat dipenuhi oleh kelompok sasaran maka secara otomatis kelompok sasaran tidak akan mendapatkan hasil program. Karena itu, elemen ini harus berkaitan satu dengan yang lain agar antara organisasi pelaksana dan kelompok sasaran sama-sama mendapatkan manfaat.

Dalam elemen kelompok sasaran lebih menekankan pada terealisasinya hasil dari implementasi program. Melalui penancangan program rumah hidroponik yang dilaksanakan pada kelompok tani Subur Makmur berupaya untuk melakukan pemberdayaan kepada perempuan yang nantinya dapat mencapai peningkatan kesejahteraan pada masyarakat. Menurut Anindita (2022) Pemberdayaan masyarakat adalah proses perubahan sosial, ekonomi, dan politik untuk memberdayakan dan memperkuat kemampuan masyarakat melalui proses belajar bersama yang partisipatif, agar terjadi perubahan perilaku pada diri semua stakeholders (individu, kelompok dan kelembagaan) yang terlibat dalam proses pembangunan demi terwujudnya kehidupan yang semakin berdaya, mandiri dan partisipatif yang semakin sejahtera secara berkelanjutan. Dikutip dalam jurnal (Kriswibowo et al. 2021) dalam pemberdayaan masyarakat, masyarakatlah yang menjadi aktor dan penentu dalam pencapaian tujuan itu sendiri. Pada tahap ini, posisi kelompok sasaran sudah

dalam kondisi siap untuk diintervensi. Kelompok sasaran mendukung implementasi program yang akan dilakukan dengan terlibat dalam wadah kelompok tani.

Kemudian seiring dengan berjalannya waktu, kegiatan pertanian perkotaan dalam hal ini rumah hidroponik semakin berkembang. Pelaksanaan kegiatan rumah hidroponik menurut peneliti merupakan bagian dari pemberdayaan masyarakat yang dapat membawa hasil pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Manfaat yang dapat dirasa oleh warga dengan adanya pertanian perkotaan adalah salah satunya adalah menyediakan bahan pangan untuk konsumsi anggota keluarga sehingga dapat meningkatkan gizi keluarga. Dengan terpenuhinya bahan pangan dari hasil bertani sendiri dapat meningkatkan kesejahteraan karena alokasi uang yang tadinya digunakan untuk membeli bahan pangan kini dapat disediakan sendiri (Santoso et al. 2018). Serta terdapat koordinasi lanjutan yang dilakukan oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Surabaya dalam melaksanakan kegiatan rumah hidroponik. Koordinasi lanjutan yang dilakukan oleh DKPP dengan kelompok tani Subur Makmur yakni pelaporan terkait hasil panen, meskipun pelaporan hasil panen tidak dilakukan setiap bulan karena kelompok tani Subur Makmur melakukan kegiatan pertanian dengan teknik hidroponik yang masa panennya tidak sebulan sekali, oleh karena itu pelaporan kegiatan pertanian mengikuti pada masa panen aktivitas pertanian mereka. Sesuai dengan pernyataan yang diberikan oleh Ibu Dian selaku Kepala Sub Bidang Pengembangan Pertanian Perkotaan pada DKPP Kota Surabaya :

"Jelas ada koordinasi lanjutan yang dilakukan oleh DKPP dengan kelompok tani Subur Makmur, meskipun tidak setiap bulan karena kelompok tani Subur Makmur ini kan menanam dengan teknik hidroponik yang masa panennya tidak sebulan sekali, jadi pelaporannya tergantung hasil panen mereka tapi pasti ada pelaporan sebagai bentuk tanggung jawab kepada kami". (Wawancara 21 Februari 2023)

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan terkait Implementasi Program Pertanian Perkotaan pada Kelompok Tani Subur Makmur di Kelurahan Pagesangan Kecamatan Jambangan Kota Surabaya, maka penulis dapat menarik kesimpulan bahwa Implementasi Program Pertanian Perkotaan pada Kelompok Tani Subur Makmur di Kelurahan Pagesangan Kecamatan Jambangan Kota Surabaya memenuhi tiga elemen dari model implementasi David C. Korten. Ketiga elemen implementasi itu meliputi adanya program yang disusun dengan matang, organisasi pelaksana atau fasilitator mengetahui dan memahami tugasnya dengan baik, serta kebutuhan kelompok sasaran program sesuai dengan program yang dijalankan. Hasil dari Implementasi Program Pertanian Perkotaan pada Kelompok Tani Subur Makmur di Kelurahan Pagesangan Kecamatan Jambangan Kota Surabaya yang dijalankan oleh kelompok sasaran program menunjukkan hasil yang baik sebagai upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat. Hal ini dapat dilihat dari indikator arah respon pelaksana terhadap implementasi yaitu menerima dan

berantusias tinggi dalam pelaksanaan program rumah hidroponik ini. Jika dilihat dalam koordinasi lanjutan antara Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Surabaya dengan kelompok tani Subur Makmur terkait pelaksanaan program rumah hidroponik, terdapat koordinasi lanjutan mengenai pelaporan hasil panen. Namun masih terdapat temuan lapangan yang belum sesuai dan sebaiknya DKPP Kota Surabaya memberikan jadwal yang jelas terkait proses pendistribusian benih kepada kelompok tani karena seperti yang sudah tercantum dalam buku *Center for Indonesian Policy Studies* disebutkan bahwa pelaku pertanian mendapatkan subsidi secara penuh dalam pelaksanaan segala aktivitas pertanian yang dalam pelaksanaan program rumah hidroponik ialah mendapatkan benih.

Referensi

- Anindita, Madania Uki. (2022). "Community Empowerment Through Village-Owned Enterprises"Enggal Makmur" Mojowarno Village Mojowarno District Jombang Regency." 20(1):2615–7268.
- Athariyanto, L. W. (2013). *Implementasi Program Urban Farming di Kelurahan Made Kecamatan Sambikerep Kota Surabaya*. 3(September), 1–8.
- Bahri, S., Sujanto, B., & Madhakomala. (2020). Model Implementasi Progam Lembaga Penjaminan Mutu. In *Model Implementasi Progam Lembaga Penjaminan Mutu*.
- Barlian, Eri, MS. (2009). Metodologi Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif. In (Issue December).
- Hardani, Nur Hikmatul Auliyah, dkk. (2020). Buku Metode Penelitian Kualitatif dan Kualitatif. In *Repository.Uinsu.Ac.Id* (Issue April).
- Illiyina, I., & Kriswibowo, A. (2022). Respon Industri Kecil Menengah (IKM) di Provinsi Jawa Timur Pada Kebijakan Sertifikasi Halal. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 22(2), 1183. <https://doi.org/10.33087/jiubj.v22i2.2378>
- Indonesia, M. P. R. (2016). Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 67/Permentan/SM.050/12/2016 Tentang Pembinaan Kelembagaan Petani. *Revista CENIC. Ciencias Biológicas*, 152(3), 28.
- Kriswibowo, A., Anindita, M. U., Sari, I. Y., & Pangestu, R. I. (2021). Pemberdayaan Masyarakat Melalui Kelompok Pusat Pelatihan Pertanian Dan Pedesaan Swadaya (P4S) "Meri Rejeki" Desa Rejosopinggir. *Journal Publicuho*, 4(2). <https://doi.org/10.35817/jpu.v4i2.18050>
- Kriswibowo, Arimurti, Khusnul Khothimah, and Rhea Ardhana. 2020. "Effectiveness O Urban Farming Policies And Economic Heroes In Poverty Reduction In The City Of Surabaya." *NATAPRAJA* 8(1):54–63. doi: 10.21831/jnp.v8i1.30964.
- Pierre, b Guy Peters and Jon. 2006. "Handbook of Public Policy." Pp. 71–86 in *agriculture*.
- Raco, Jozef. 2018. "Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakteristik Dan Keunggulannya." doi: 10.31219/osf.io/mfzuj.

- Ramdani, W. N. R., Nasir, M., & Sudirman, F. A. (2021). Implementasi Aplikasi SiCANTIK pada Dinas PMPTSP Kota Kendari: Tinjauan E-Government. *PAMARENDA: Public Administration and Government Journal*, 1(1), 1. <https://doi.org/10.52423/pamarenda.v1i1.19305>
- Santoso, E. B., Ratna, R., Gerakan, W. ;, Perkotaan, P., Surabaya, K., & Ratna Widya, R. (2018). *Gerakan Pertanian Perkotaan Dalam Mendukung Kemandirian Masyarakat Di Kota Surabaya*.
- Setyaningrum, S. D. (2021). *Impelemntasi Program Urban Farming Dalam Meningkatkan Kualitas Hidup Masyarakat Perkotaan (Studi Kasus Pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Malang)*. 21701091049, 1–150.
- Sudirman, F. A., & Phradiansah, P. (2019). Tinjauan Implementasi Pembangunan Berkelanjutan: Pengelolaan Sampah Kota Kendari. *JURNAL SOSIAL POLITIK*, 5(2), 291. <https://doi.org/10.22219/sospol.v5i2.9821>
- Surabaya, W. (2015). *Peraturan Walikota Surabaya Nomor 56 Tahun 2016*. 1965, 1–7.